

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dan sedang giat melakukan kegiatan pembangunan. Hal tersebut ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan pembangunan tersebut tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena dalam kegiatan pembangunan juga membutuhkan dana yang relatif besar.

Salah satu potensi terbesar sumber penerimaan dari Negara Indonesia adalah berasal dari penerimaan pajak. Sebagai sumber penerimaan yang sangat potensial, menggunakan dana yang berasal dari pajak, dianggap sangatlah efektif dan efisien, karena selain dananya yang relatif besar, penerimaannya juga sangat relatif stabil, selain itu juga dapat mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam rangka kegiatan pembangunan.

Pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan kegiatan bersama antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan di setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar program – program yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi sesuai dengan rencana. Selain itu peran dari masyarakat juga sangatlah penting, karna dengan bantuan dari pihak masyarakat kegiatan pembangunan akan lebih mudah dijalankan. Oleh karna itu kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak juga perlu ditingkatkan.

Pajak yang dipungut dari warga Negara Indonesia adalah merupakan pungutan wajib yang dapat dipaksakan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ” .

Berdasarkan wilayah pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat atau sering disebut sebagai Pajak Negara adalah Pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak yang dikelola untuk kegiatan negara dan pembelanjaan rutin negara atau sering dikatakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diantaranya adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Sedangkan untuk pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik oleh pemerintah tingkat Provinsi maupun pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah di tingkat provinsi pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan pembiayaan kegiatan yang ada di tingkat Provinsi tersebut, sedangkan pajak daerah di tingkat Kabupaten/Kota pemungutan dan pengelolaannya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yang danannya digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Diantarannya adalah : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Provinsi dibagi menjadi lima jenis. Adapun jenis pajak yang dipungut di tingkat provinsi adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Salah satu hasil penerimaan dari pajak Provinsi yang disebutkan diatas adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Dari segi macam kendaraan bermotor yang berbeda maka besar perolehan pajak tiap jenis juga berbeda pula. Berikut adalah data objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur sampai dengan Tahun 2014. Akan dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Timur
Tahun 2014

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Objek Pajak	PKB (Rp)
1.	Sedan	15.829	37.964.964.125
2.	Jeep	10.984	35.116.703.625
3.	Station Wagon	85.803	162.136.129.400
4.	Microbus	897	1.323.930.300
5.	Truck	29.331	53.892.302.875
6.	Sepeda Motor	448.423	81.454.030.751
7.	Alat Berat	22	5.589.300
Jumlah		591.289	371.893.650.376

Sumber : Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT

Surabaya Timur

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan yang sangat penting bagi Penerimaan Asli Daerah, karena penerimaannya yang relatif besar dan stabil sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Asli daerah. Di Jawa Timur khususnya di wilayah Surabaya Timur Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan-

penerimaan dari sektor yang lainnya. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Penerimaan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur yang wilayah operasinya mencakup Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar, dan Kecamatan Mulyorejo, penerimaan tertinggi yang didapatkan adalah penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

**Realisasi Penerimaan Setiap Sektor Penerimaan Asli Daerah pada UPT
Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur Tahun 2014**

No.	Jenis Pungutan	Penerimaan (Rp)		
		Target	Realisasi	Prosentase
1.	PKB	337.535.819.000	343.451.714.115	101,75
2.	BBNKB	295.645.861.000	302.698.385.500	102,39
3.	P3AP	18.110.000	18.110.700	100,00
4.	RJU	224.000.000	291.946.445	130,33
5.	Pendapatan Lain	100.000.000	142.994.770	142,99
6.	Denda	0	4.714.826.224	0,00
Jumlah		633.523.790.000	651.317.977.754	102,81

Sumber : Penerimaan Asli Daerah SAMSAT Surabaya Timur 2014

Pada Tahun 2014 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 101,75 % atau senilai Rp. 345.451.714.115 lebih besar penerimaannya dibandingkan dengan sektor penerimaan yang lainnya. Sehingga dengan adanya pungutan dari Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan asli daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penerimaan dari pajak memang memiliki potensi yang sangat tinggi, namun untuk mendapatkannya juga harus dibantu oleh peran serta masyarakat. Dengan

kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat penerimaan asli daerah pun akan semakin lebih baik, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan umum dapat dimaksimalkan, serta kegiatan – kegiatan pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan rencana .

Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, berlaku sistem Official Assesment, yaitu dimana fiskus menetapkan jumlah pajak terutangnya kemudian wajib pajak membayarkan jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan oleh fiskus pada lembaga yang telah ditunjuk. Akan tetapi tidak sepenuhnya masyarakat menaati peraturan yang berlaku, masih saja banyak terjadi kelalaian dari masyarakat dalam pemenuhan pembayaran perpajakannya, meskipun sudah berbagai cara dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidklancaran pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu meningkatkan upaya-upaya yang dapat membantu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Adapun judul yang kemudian diangkat dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah “PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA TIMUR”

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dimaksud adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah dalam Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur.
 2. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja serta dapat membiasakan diri beradaptasi dengan lingkungan kerja agar dapat digunakan sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Bagi Almamater
 1. Menjalin hubungan antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur.
 2. Memberikan tambahan referensi bagi ruang baca yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 3. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga.
- c. Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur.

Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur selama waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- d. Bagi Pembaca
 1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi pembaca untuk penulisan kegiatan sejenis di bidang Perpajakan.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

- a. Objek Praktik Kerja Lapangan
 1. Bidang : Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Topik : **“PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA TIMUR”**
- b. Subjek Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Timur Jl. Menur 31 B Surabaya.
- c. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai tanggal 14 Maret 2015. Tabel Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2014-2015

No.	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan permohonan izin PKL							
2.	Pelaksanaan PKL							
3.	Pembayaran SOP dan daftar ulang mahasiswa							
4.	Penyusunan Proposal PKL							
5.	Penyerahan buku pedoman PKL							
6.	Penyerahan Proposal PKL							
7.	Bimbingan penulisan Laporan PKL							
8.	UAS Genap							
9.	Ujian Presentasi							

Sumber: Data diolah, 2015.